

PEMULIHAN EKONOMI DAN TANTANGAN MEMPERKUAT KELAS MENENGAH INDONESIA

*Daya Beli, Pekerjaan Berkualitas, Mobilitas Sosial, dan Ketahanan
Rumah Tangga*

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

2026

Pemulihan Ekonomi dan Tantangan Memperkuat Kelas Menengah Indonesia

Daya Beli, Pekerjaan Berkualitas, Mobilitas Sosial, dan Ketahanan Rumah Tangga

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyc.com/cv.pdf
IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

PILAR PENGUATAN KELAS MENENGAH

- Daya Beli
- Pekerjaan Berkualitas
- Perumahan
- Pendidikan
- Kesehatan
- UMKM
- Mobilitas Sosial
- Stabilitas Harga

“Kelas menengah yang kuat adalah fondasi pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”

Abstrak

Pemulihan ekonomi yang kuat tidak cukup dinilai dari kembalinya pertumbuhan Produk Domestik Bruto, turunnya pengangguran, atau meningkatnya investasi. Kualitas pemulihan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat mempertahankan dan meningkatkan posisi sosial-ekonominya. Dalam konteks Indonesia, kelas menengah memiliki arti strategis karena menjadi penopang konsumsi, tabungan, penerimaan negara, kewirausahaan, investasi pendidikan, perumahan, dan stabilitas sosial. Namun kelompok ini tidak homogen dan tidak seluruhnya aman dari risiko turun kelas. Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2024 kelompok menuju kelas menengah mencakup 49,29 persen penduduk dan kelas menengah 17,25 persen; bersama kelompok tersebut membentuk basis permintaan domestik yang sangat besar. Pada saat yang sama, tekanan biaya hidup, kualitas pekerjaan, upah riil, perumahan, pendidikan, kesehatan, utang rumah tangga, serta perubahan teknologi dapat memperlemah ketahanan mereka. Artikel ini membahas secara naratif dan komprehensif hubungan antara pemulihan ekonomi dan agenda memperkuat kelas menengah Indonesia. Argumen utamanya adalah bahwa kebijakan kelas menengah tidak dapat dipersempit menjadi subsidi konsumsi, tetapi harus membangun fondasi mobilitas dan resiliensi melalui pekerjaan produktif, kenaikan produktivitas dan upah riil, layanan publik berkualitas, perumahan dan transportasi terjangkau, perlindungan sosial adaptif, akses pendidikan, pengelolaan risiko keuangan, transformasi UMKM, serta tata kelola yang mendorong persaingan dan kesempatan. Pemulihan yang berhasil adalah pemulihan yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperluas jumlah rumah tangga yang mampu naik kelas dan bertahan di kelas menengah secara berkelanjutan.

Kata Kunci

pemulihan ekonomi; kelas menengah; menuju kelas menengah; daya beli; upah riil; pekerjaan berkualitas; mobilitas sosial; ketahanan rumah tangga; perlindungan sosial; perumahan; Indonesia

Potret Kontekstual Indonesia

Indikator	Data	Relevansi
Kelas menengah, September 2024	17,25% atau 48,41 juta jiwa	Basis penting konsumsi, tabungan, pajak, dan mobilitas sosial.
Menuju kelas menengah, September 2024	49,29% atau 138,31 juta jiwa	Kelompok terbesar yang berpotensi naik kelas tetapi juga rentan terhadap shock.
Rentan miskin, September 2024	24,42% atau 68,51 juta jiwa	Menunjukkan spektrum kerentanan yang luas di atas garis kemiskinan.
Kelas menengah + menuju kelas menengah, 2024	66,35% penduduk; 81,49% konsumsi masyarakat	Menegaskan peran sentral kedua kelompok bagi permintaan domestik.
Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026	5,61% y-on-y	Memberi ruang pemulihan, tetapi harus diterjemahkan menjadi pendapatan riil.

TPT Februari 2026	4,68%	Pengangguran terbuka membaik, namun kualitas pekerjaan tetap menentukan.
Rata-rata upah buruh Februari 2026	Rp3,29 juta per bulan	Ketahanan kelas menengah membutuhkan kenaikan upah riil dan produktivitas.
Inflasi Juni 2026	3,34% y-on-y	Biaya hidup menentukan apakah pendapatan nominal benar-benar meningkat.
IKK Mei 2026	120,9	Keyakinan konsumen masih berada pada zona optimis.

1. Pendahuluan: Mengapa Kelas Menengah Menjadi Ukuran Kualitas Pemulihan

Pemulihan ekonomi biasanya dimulai ketika kontraksi berhenti, produksi kembali tumbuh, investasi meningkat, dan pengangguran menurun. Namun pemulihan yang hanya mengembalikan ekonomi kepada angka pertumbuhan positif belum tentu mengembalikan rasa aman rumah tangga. Di antara kelompok miskin dan kelompok kaya terdapat spektrum luas masyarakat yang telah melampaui kebutuhan dasar tetapi belum memiliki kekayaan dan perlindungan cukup untuk menghadapi shock. Di sinilah kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah menjadi kunci membaca kualitas pemulihan.

BPS menunjukkan bahwa pada 2024 kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah secara bersama mencakup 66,35 persen penduduk Indonesia dan menyumbang 81,49 persen konsumsi masyarakat. Besarnya kontribusi tersebut menjelaskan mengapa kondisi kelas menengah memengaruhi dinamika perdagangan, perumahan, transportasi, pendidikan, keuangan, pariwisata, dan UMKM. Ketika kelompok ini optimis dan memiliki pendapatan riil yang kuat, permintaan domestik menjadi stabil. Ketika mereka menahan belanja, dampaknya menyebar luas.

Namun kelas menengah tidak identik dengan kelompok kaya. BPS menempatkan kelas menengah sebagai mereka yang pengeluarannya berada pada kisaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan, sedangkan kelompok menuju kelas menengah berada pada 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan. Definisi ini mengingatkan bahwa banyak rumah tangga yang secara statistik berada di atas kemiskinan masih memiliki buffer yang terbatas. Satu episode sakit, PHK, kegagalan usaha, atau biaya pendidikan tinggi dapat mendorong mereka turun kelas.

Karena itu, agenda memperkuat kelas menengah adalah agenda membangun mobilitas sekaligus resiliensi. Pemerintah perlu menciptakan tangga yang memungkinkan kelompok bawah naik, dan pagar pengaman agar keluarga yang sudah naik tidak mudah jatuh kembali. Kedua fungsi tersebut harus berlangsung bersamaan.

2. Siapa yang Disebut Kelas Menengah Indonesia?

Kelas menengah merupakan konsep ekonomi sekaligus sosial. Secara ekonomi, ia sering didefinisikan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran. Secara sosial, kelas menengah biasanya dikaitkan dengan pendidikan, pekerjaan profesional, kepemilikan rumah, keamanan pekerjaan, akses teknologi, kemampuan menabung, dan aspirasi terhadap kualitas layanan. Karena definisi dapat berbeda, analisis harus menyebutkan dasar pengukuran yang digunakan.

BPS pada September 2024 mencatat 24,06 juta penduduk miskin, 68,51 juta rentan miskin, 138,31 juta menuju kelas menengah, 48,41 juta kelas menengah, dan 1,29 juta kelas atas. Struktur ini menunjukkan bahwa kelompok menuju kelas menengah jauh lebih besar daripada kelas menengah yang telah mapan. Artinya, Indonesia memiliki basis aspirasi mobilitas yang sangat besar, tetapi juga menghadapi risiko downward mobility.

Kelompok menuju kelas menengah sering berada pada posisi yang sulit. Mereka tidak selalu memenuhi syarat bantuan yang ditujukan kepada kelompok miskin, tetapi kemampuan mereka membeli layanan privat berkualitas juga terbatas. Mereka menanggung biaya pendidikan, transportasi, sewa atau cicilan, kesehatan, dan komunikasi dengan ruang tabungan yang kecil. Kebijakan publik yang berkualitas sangat menentukan taraf hidup kelompok ini.

Kelas menengah juga berbeda antarwilayah. Pendapatan yang cukup untuk hidup relatif nyaman di kota kecil mungkin tidak cukup di Jakarta atau pusat industri dengan biaya perumahan tinggi. Karena itu, ukuran nasional perlu dibaca bersama biaya hidup regional dan struktur kebutuhan rumah tangga.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

3. Mengapa Kelas Menengah Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi

Kelas menengah berperan besar dalam konsumsi non-makanan, termasuk perumahan, pendidikan, kendaraan, perjalanan, layanan digital, jasa keuangan, dan rekreasi. Permintaan mereka mendorong diversifikasi ekonomi dari kebutuhan dasar menuju sektor jasa dan industri dengan nilai tambah lebih tinggi. Ini membantu menciptakan pasar domestik yang cukup besar bagi perusahaan untuk berkembang.

Selain sebagai konsumen, kelas menengah merupakan sumber tabungan. Tabungan rumah tangga mendukung sistem perbankan, pasar modal, dana pensiun, dan pembiayaan investasi. Rumah tangga yang memiliki buffer finansial juga lebih berani memulai usaha, berpindah pekerjaan, atau membiayai pendidikan lanjutan.

Kelas menengah merupakan basis pajak yang penting karena banyak anggotanya berada dalam sektor formal, memiliki aset, dan melakukan konsumsi kena pajak. Dengan basis kelas menengah yang lebih luas, negara dapat membiayai layanan publik dengan ketergantungan yang lebih rendah pada sumber penerimaan yang volatil.

Secara politik-ekonomi, kelas menengah sering mendorong permintaan terhadap layanan publik berkualitas, transparansi, meritokrasi, dan lingkungan perkotaan yang layak. Walaupun hubungan ini tidak selalu otomatis, peningkatan jumlah warga dengan pendidikan dan aset yang lebih tinggi dapat meningkatkan ekspektasi terhadap kualitas institusi.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

4. Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Risiko Pemulihan yang Tidak Merata

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Namun pertumbuhan agregat dapat menyembunyikan perbedaan pengalaman antar sektor, wilayah, dan kelompok pendapatan. Sektor tertentu dapat berkembang cepat sementara pekerjaan dan upah di sektor lain stagnan.

Pemulihan yang tidak merata muncul ketika pemilik aset memperoleh keuntungan lebih cepat daripada pekerja, atau ketika sektor padat modal tumbuh lebih cepat daripada sektor yang menyerap tenaga kerja. Harga properti dan aset dapat naik sementara upah riil bergerak lambat, sehingga kelompok muda semakin sulit mengakumulasi kekayaan.

World Bank dalam Indonesia Economic Prospects 2025 menyoroti bahwa manfaat pertumbuhan tetap dirasakan kelompok miskin, tetapi returns bagi kelompok menuju kelas menengah melemah sebagaimana tercermin pada konsumsi yang lebih lambat. Ini menunjukkan bahwa fokus pada pengentasan kemiskinan perlu dilengkapi agenda memperkuat pekerjaan dan standar hidup kelas menengah.

Pemulihan yang inklusif harus menghubungkan pertumbuhan dengan pekerjaan produktif, pendapatan riil, dan layanan publik. Tanpa linkage tersebut, statistik makro dapat membaik sementara rumah tangga tetap merasa tertekan.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

5. Pekerjaan Berkualitas: Fondasi Utama Kelas Menengah

Sebagian besar rumah tangga memasuki kelas menengah melalui pekerjaan, bukan melalui transfer atau warisan. Karena itu, penciptaan pekerjaan berkualitas merupakan kebijakan kelas menengah yang paling fundamental. Pekerjaan tersebut harus memberikan pendapatan memadai, stabilitas, perlindungan, kesempatan belajar, dan prospek kenaikan karier.

Pada Februari 2026, TPT Indonesia sebesar 4,68 persen dan rata-rata upah buruh Rp3,29 juta per bulan. Angka pengangguran yang relatif rendah merupakan capaian positif, tetapi tidak otomatis menunjukkan tingginya kualitas pekerjaan. Banyak pekerja berada pada sektor informal atau pekerjaan dengan produktivitas rendah.

Pekerjaan kelas menengah biasanya membutuhkan produktivitas lebih tinggi. Industri pengolahan, layanan profesional, keuangan, teknologi, kesehatan, pendidikan, logistik, industri kreatif, pariwisata berkualitas, dan manufaktur modern dapat menyediakan jalur karier. Namun akses memerlukan keterampilan dan lokasi yang sesuai.

Kebijakan investasi harus menilai employment quality, bukan hanya jumlah pekerjaan. Pekerjaan sementara dengan upah rendah berbeda dari pekerjaan yang membangun keterampilan dan membuka mobilitas. Target kebijakan perlu memasukkan wage progression dan career ladder.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

6. Upah Riil, Produktivitas, dan Tekanan Biaya Hidup

Kelas menengah dapat melemah meskipun upah nominal naik apabila biaya hidup meningkat lebih cepat. Inflasi Juni 2026 sebesar 3,34 persen menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap penting. Namun pengalaman biaya hidup dipengaruhi oleh perumahan, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan cicilan yang tidak selalu tercermin penuh dalam persepsi inflasi umum.

World Bank pada 2025 menekankan perlunya pekerjaan yang lebih baik untuk mempertahankan standar hidup kelas menengah. Masalah ini berkaitan dengan produktivitas. Perusahaan berproduktivitas rendah memiliki ruang terbatas untuk menaikkan upah tanpa menaikkan harga atau kehilangan daya saing.

Produktivitas perlu ditingkatkan melalui teknologi, keterampilan, kualitas manajemen, logistik, energi, dan akses pasar. Namun manfaat produktivitas juga perlu diteruskan kepada pekerja melalui persaingan tenaga kerja yang sehat, sistem pengupahan, dan mobilitas karier.

Kebijakan kelas menengah yang hanya menahan harga tanpa meningkatkan produktivitas akan rapuh. Sebaliknya, strategi produktivitas tanpa perhatian pada distribusi dapat membuat pekerja tidak merasakan hasil transformasi.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

7. Perumahan: Titik Lemah Ketahanan Kelas Menengah

Perumahan merupakan salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga kelas menengah. Kenaikan harga rumah dan sewa dapat menyerap porsi besar kenaikan pendapatan. Bagi generasi muda, kesenjangan antara harga properti dan kemampuan menabung untuk uang muka dapat menunda pembentukan aset.

World Bank pada 2025 mengangkat reformasi perumahan sebagai jalur yang dapat menghubungkan rumah, pekerjaan, investasi, dan kemakmuran. Perumahan yang terjangkau dekat lokasi kerja mengurangi biaya perjalanan dan memperbaiki produktivitas perkotaan.

Kebijakan rumah murah yang berada terlalu jauh dari pusat pekerjaan dapat menghasilkan false affordability. Harga unit rendah, tetapi total biaya hidup tinggi karena transportasi dan waktu. Karena itu, perumahan harus diintegrasikan dengan transportasi publik dan tata ruang.

Perumahan juga merupakan instrumen akumulasi kekayaan. Kebijakan yang memperluas akses kepemilikan secara sehat dapat memperkuat neraca rumah tangga, tetapi pembiayaan yang terlalu agresif dapat meningkatkan risiko utang.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

8. Pendidikan dan Investasi pada Anak

Kelas menengah biasanya menempatkan pendidikan sebagai investasi utama. Rumah tangga bersedia mengalokasikan bagian besar pendapatan untuk sekolah, kursus, perguruan tinggi, dan akses digital karena pendidikan dipandang sebagai jalur mobilitas. Namun biaya tinggi dapat mengurangi tabungan dan menekan konsumsi lain.

Kualitas pendidikan publik berfungsi sebagai social wage. Ketika sekolah publik berkualitas, keluarga tidak harus membeli layanan privat mahal untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini mengurangi beban kelas menengah sekaligus memperluas kesetaraan kesempatan.

Pendidikan tinggi perlu lebih terhubung dengan pasar kerja. Gelar tanpa prospek pekerjaan produktif dapat menghasilkan credential mismatch. Kurikulum, internship, apprenticeship, dan career services perlu diperkuat agar investasi pendidikan menghasilkan return yang wajar.

Transformasi AI menambah urgensi lifelong learning. Kelas menengah yang bergantung pada pekerjaan administratif dan profesional perlu terus memperbarui keterampilan agar tidak kehilangan posisi akibat perubahan tugas.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional.

Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

9. Kesehatan dan Risiko Turun Kelas

Sakit merupakan salah satu shock paling kuat terhadap neraca rumah tangga. Biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan dapat terjadi bersamaan. Kelas menengah yang tidak memiliki proteksi cukup dapat menguras tabungan atau menjual aset.

Jaminan kesehatan publik mengurangi risiko tersebut. Manfaatnya tidak hanya bagi kelompok miskin. Kelas menengah memperoleh kepastian bahwa satu peristiwa kesehatan tidak menghancurkan akumulasi aset bertahun-tahun.

Kualitas layanan menjadi penting karena rumah tangga akan tetap membeli layanan privat bila layanan publik dianggap lambat atau tidak memadai. Reformasi kesehatan perlu memperhatikan akses, mutu, obat, tenaga kesehatan, dan continuity of care.

Kesehatan mental juga menjadi isu kelas menengah perkotaan. Tekanan pekerjaan, commuting, utang, dan biaya pendidikan dapat meningkatkan stres. Produktivitas dan kesejahteraan membutuhkan pendekatan kesehatan yang lebih luas.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

10. Pajak dan Kontrak Fiskal dengan Kelas Menengah

Kelas menengah sering berada pada posisi sebagai pembayar pajak sekaligus pengguna layanan publik. Mereka akan menilai sistem fiskal dari keseimbangan antara kontribusi dan manfaat. Kepatuhan lebih mudah dibangun ketika pajak sederhana, adil, dan terlihat berubah menjadi layanan berkualitas.

Kebijakan pajak konsumsi memiliki dampak distribusional. Kenaikan tarif dapat memengaruhi kelas menengah karena volume konsumsi mereka besar. Reformasi perlu mempertimbangkan kompensasi melalui layanan atau pengurangan beban lain.

Subsidi universal sering tidak efisien karena manfaat besar dapat mengalir kepada rumah tangga berpendapatan tinggi. OECD pada 2026 menyarankan penargetan subsidi energi yang lebih baik kepada kelompok rentan. Ruang fiskal yang dihemat dapat digunakan untuk layanan yang memperkuat kelas menengah secara lebih produktif.

Kontrak fiskal yang sehat bukan berarti semua kelompok menerima kembali jumlah yang sama. Prinsipnya adalah fairness, transparansi, dan keyakinan bahwa kontribusi digunakan untuk memperluas kesempatan dan mengurangi risiko sosial.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

11. Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah yang Rentan

Perlindungan sosial sering diasosiasikan dengan kemiskinan, tetapi ekonomi modern memerlukan sistem yang mencakup risiko kelas menengah. PHK, penyakit, disabilitas, atau kegagalan usaha dapat menurunkan pendapatan secara tiba-tiba.

Bantuan yang hanya diberikan berdasarkan status miskin sebelum shock dapat terlambat. Sistem perlu mampu memasukkan rumah tangga baru yang mengalami kehilangan pendapatan. Data dinamis dan mekanisme registrasi cepat penting.

Asuransi pengangguran dan layanan penempatan dapat membantu pekerja mempertahankan konsumsi sambil mencari pekerjaan yang sesuai. Tanpa buffer, pekerja mungkin menerima pekerjaan pertama yang tersedia meskipun jauh di bawah keterampilan, menghasilkan downward occupational mobility.

Perlindungan sosial perlu dihubungkan dengan reskilling. Tujuannya bukan mempertahankan pekerjaan lama selamanya, melainkan menjaga manusia selama transisi menuju pekerjaan baru.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

12. Utang Rumah Tangga, Paylater, dan Ilusi Kemakmuran

Konsumsi kelas menengah semakin terhubung dengan kredit. Kredit perumahan, kendaraan, pendidikan, kartu kredit, dan paylater dapat meningkatkan kesejahteraan ketika digunakan secara proporsional. Namun utang berlebihan dapat membuat rumah tangga tampak sejahtera sementara neracanya rapuh.

Indikator konsumsi tidak selalu menunjukkan sumber pembiayaan. Peningkatan penjualan dapat berasal dari pendapatan atau leverage. Karena itu, pemantauan kelas menengah perlu memasukkan debt service ratio, tunggakan, dan kualitas kredit.

Paylater memperkecil hambatan transaksi tetapi juga memanfaatkan kecenderungan manusia memprioritaskan manfaat saat ini. Transparansi total biaya dan kemampuan bayar harus menjadi bagian perlindungan konsumen.

Literasi keuangan perlu mengajarkan pembangunan aset, bukan hanya pengelolaan utang. Tabungan darurat, dana pensiun, asuransi, dan investasi yang sesuai risiko adalah fondasi kelas menengah yang tahan shock.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

13. UMKM dan Wirausaha Kelas Menengah

Sebagian kelas menengah Indonesia memperoleh pendapatan dari usaha, bukan gaji. UMKM menjadi jalur mobilitas ketika mampu berkembang dari usaha subsisten menjadi perusahaan produktif yang menciptakan pekerjaan.

Kredit saja tidak cukup. Usaha memerlukan pasar, manajemen, teknologi, standar mutu, logistik, dan kemampuan mengelola arus kas. Program pemerintah harus mengukur kenaikan produktivitas dan profitabilitas.

Digitalisasi membuka pasar baru, tetapi persaingan platform dapat menekan margin. Pengusaha perlu memahami pricing, customer acquisition, data, dan omnichannel strategy.

Supplier development dapat menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar dan hilirisasi. Ketika usaha lokal memperoleh kontrak stabil dan naik standar, pemilik serta pekerjanya dapat memasuki kelas menengah.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

14. Digitalisasi dan AI: Ancaman atau Penguat Kelas Menengah?

AI dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan profesional, administrasi, desain, pemasaran, pendidikan, dan layanan keuangan. Kelas menengah yang mampu memanfaatkan AI dapat meningkatkan output dan pendapatan. Namun mereka yang pekerjaannya terdiri dari tugas rutin menghadapi risiko substitusi.

Dampak teknologi terjadi pada tugas sebelum pekerjaan. Sebagian tugas diotomatisasi sementara tugas lain menjadi lebih penting. Karena itu, reskilling harus berfokus pada kombinasi domain knowledge, analisis, komunikasi, kreativitas, dan kemampuan bekerja dengan sistem AI.

Kesenjangan akses teknologi dapat menciptakan middle-class divide. Perusahaan besar memberi karyawan alat dan pelatihan, sementara pekerja UMKM tertinggal. Program difusi digital perlu menjangkau perusahaan kecil.

Kebijakan harus melindungi pekerja, bukan membekukan teknologi. Portable benefits, career services, dan training accounts dapat mendukung mobilitas.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

15. Kelas Menengah Muda dan Krisis Keterjangkauan

Generasi muda menghadapi jalur yang berbeda dari orang tua mereka. Pendidikan lebih tinggi tidak selalu menjamin pekerjaan dengan upah sebanding, sementara harga rumah dan kebutuhan perkotaan meningkat. Ketidakpastian kerja kontrak dan gig menambah tekanan.

Delayed household formation dapat muncul ketika pekerjaan dan perumahan tidak cukup terjangkau. Keputusan menikah, memiliki anak, atau membeli rumah menjadi tertunda. Fenomena ini mempunyai implikasi demografi dan konsumsi.

Kebijakan harus memperkuat first-job transition melalui apprenticeship, career guidance, dan koneksi kampus-industri. Pendapatan awal karier sangat menentukan trajectory jangka panjang.

Perumahan sewa berkualitas dan transportasi publik dapat memberi alternatif sebelum kepemilikan rumah. Kebijakan kelas menengah tidak boleh menganggap kepemilikan rumah sebagai satu-satunya model kesejahteraan.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

16. Perempuan dan Kelas Menengah

Partisipasi perempuan memperkuat ketahanan rumah tangga karena dua sumber pendapatan mengurangi risiko kehilangan satu pekerjaan. Namun childcare, keselamatan, transportasi, dan pembagian kerja domestik dapat membatasi partisipasi.

Investasi daycare berkualitas dapat meningkatkan partisipasi kerja sekaligus menciptakan pekerjaan di care economy. Kebijakan ini memiliki multiplier ekonomi dan sosial.

Perempuan juga menghadapi career interruption setelah memiliki anak. Fleksibilitas kerja dan sistem re-entry membantu mencegah kehilangan human capital.

Penguatan kelas menengah memerlukan kebijakan gender yang melihat rumah tangga sebagai unit ekonomi dengan pembagian waktu dan risiko.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

17. Wilayah dan Ketimpangan Geografis Kelas Menengah

Kelas menengah Indonesia terkonsentrasi lebih kuat di wilayah perkotaan dan daerah dengan ekonomi formal yang berkembang. Peluang pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik tidak terdistribusi merata.

Urbanisasi merupakan jalur mobilitas, tetapi dapat menimbulkan biaya tinggi dan kemacetan. Pengembangan secondary cities dapat menyebarkan kesempatan dan mengurangi tekanan metropolitan.

Daerah berbasis komoditas menghadapi volatilitas. Kelas menengah lokal dapat tumbuh ketika harga komoditas tinggi lalu melemah saat siklus berbalik. Diversifikasi ekonomi menjadi penting.

Kebijakan regional perlu membangun ekosistem pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan agar kelas menengah dapat tumbuh di luar pusat utama.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

18. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kelas Menengah

Bencana dan cuaca ekstrem dapat merusak rumah, usaha, dan pendapatan. Kelas menengah sering memiliki aset lebih besar daripada kelompok miskin tetapi tidak selalu memiliki asuransi cukup.

Kenaikan harga pangan dan energi akibat shock iklim mengurangi disposable income. Rumah tangga dengan cicilan tinggi memiliki ruang adaptasi lebih kecil.

Asuransi bencana, infrastruktur tahan iklim, dan sistem peringatan dini menjadi bagian kebijakan kelas menengah. Ketahanan aset sama pentingnya dengan pendapatan.

Transisi hijau dapat menciptakan pekerjaan baru, tetapi perlu reskilling agar pekerja di sektor lama tidak turun kelas.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

19. Kepercayaan Konsumen dan Psikologi Kelas Menengah

Bank Indonesia mencatat IKK Mei 2026 sebesar 120,9, menunjukkan keyakinan konsumen tetap kuat. Optimisme mendukung pembelian barang tahan lama, rumah, kendaraan, dan investasi pendidikan.

Namun kelas menengah sensitif terhadap ekspektasi. Kabar PHK, kenaikan suku bunga, atau harga rumah dapat memicu precautionary saving meskipun pendapatan saat ini belum berubah.

Kepercayaan tidak dapat diproduksi melalui komunikasi saja. Ia dibangun oleh pengalaman stabilitas pekerjaan, harga, layanan publik, dan aturan yang dapat diprediksi.

Indeks keyakinan perlu dibaca bersama real wage, kredit, tabungan, dan penjualan ritel agar tidak salah menafsirkan optimisme sementara.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

20. Agenda Kebijakan Memperkuat Kelas Menengah Indonesia

Agenda pertama adalah memperluas pekerjaan kelas menengah melalui industrialisasi, jasa modern, digital economy, kesehatan, pendidikan, logistik, ekonomi kreatif, pariwisata berkualitas, dan green sectors. Investasi perlu dinilai dari wage ladder dan skill formation.

Agenda kedua adalah produktivitas dan upah riil. Perusahaan perlu didorong mengadopsi teknologi dan manajemen yang lebih baik, sementara pekerja memperoleh akses reskilling dan mobilitas.

Agenda ketiga adalah menurunkan biaya hidup sistemik melalui perumahan, transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan energi yang efisien. Pendapatan kelas menengah harus dilihat setelah biaya wajib.

Agenda keempat adalah memperkuat social insurance dan protection against shocks. Sistem kesehatan, pensiun, pengangguran, dan perlindungan bencana mengurangi risiko turun kelas.

Agenda kelima adalah membangun aset. Kebijakan perumahan, tabungan, investasi, dan kewirausahaan perlu membantu rumah tangga memiliki buffer.

Agenda keenam adalah memperkuat kelompok menuju kelas menengah. Kebijakan tidak boleh hanya fokus pada kelas menengah yang sudah mapan; 138 juta lebih penduduk pada kategori menuju kelas menengah merupakan reservoir utama mobilitas sosial.

Agenda ketujuh adalah memastikan pajak dan subsidi adil serta mudah dipahami. Kelas menengah perlu melihat kualitas layanan sebagai imbal balik sosial atas kontribusi fiskal.

Agenda kedelapan adalah menggunakan dashboard kelas menengah: real wage, housing burden, education costs, debt service ratio, health shocks, job transitions, savings, dan mobility indicators.

Agenda kesembilan adalah regionalisasi kebijakan. Cost of living dan opportunity structure berbeda antarwilayah, sehingga target harus disesuaikan.

Agenda kesepuluh adalah membangun kepercayaan melalui konsistensi kebijakan. Kelas menengah membuat keputusan jangka panjang; ketidakpastian aturan meningkatkan biaya berjaga-jaga.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

21. Ilustrasi Kasus Rumah Tangga Kelas Menengah

Kasus pertama adalah pasangan muda dengan dua pendapatan di Jakarta. Keduanya bekerja formal dan secara pendapatan masuk kelas menengah, tetapi hampir setengah pendapatan habis untuk sewa, transportasi, daycare, dan cicilan. Mereka mampu mengonsumsi tetapi sulit menabung untuk rumah. Dalam kasus ini, masalah bukan kemiskinan melainkan affordability.

Kasus kedua adalah keluarga pemilik usaha kecil di kota kabupaten. Pendapatan meningkat saat ekonomi tumbuh, tetapi tidak stabil. Keluarga memiliki rumah, namun belum mempunyai asuransi atau dana pensiun. Satu sakit serius dapat menghabiskan modal usaha. Kebutuhan utama mereka adalah perlindungan risiko dan formal financial planning.

Kasus ketiga adalah pekerja profesional yang terdampak AI. Perusahaannya mengotomasi sebagian tugas dan melakukan restrukturisasi. Tanpa reskilling, ia berisiko menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah. Dengan training account dan career service, transisi dapat dipercepat.

Kasus keempat adalah keluarga menuju kelas menengah di wilayah industri. Pendapatan meningkat karena anggota keluarga memperoleh pekerjaan pabrik, tetapi biaya sewa lokal naik. Mereka dapat naik ke kelas menengah jika upah dan produktivitas terus meningkat serta ada perumahan terjangkau.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa memperkuat kelas menengah memerlukan kebijakan berbeda menurut sumber pendapatan, usia, aset, wilayah, dan struktur biaya.

Implikasi kebijakan dan manajemen

Secara manajerial, bagian ini menuntut evaluasi kebijakan berbasis outcome rumah tangga. Program harus dinilai dari pengaruhnya terhadap pendapatan riil, biaya wajib, keamanan kerja, kemampuan

menabung, dan mobilitas. Pemerintah juga perlu membedakan kelompok kelas menengah mapan, menuju kelas menengah, pekerja formal, pengusaha kecil, rumah tangga muda, dan kelompok regional. Segmentasi membuat intervensi lebih presisi dan mengurangi kebijakan seragam yang mahal tetapi kurang efektif.

22. Kesimpulan: Dari Pemulihan Menuju Mobilitas dan Ketahanan

Pemulihan ekonomi Indonesia memiliki arti strategis jika menghasilkan masyarakat yang lebih mampu naik kelas dan lebih sulit jatuh kembali. Kelas menengah merupakan indikator penting karena berada di antara keberhasilan mengurangi kemiskinan dan aspirasi menuju negara berpendapatan tinggi.

Data BPS menunjukkan besarnya kelompok menuju kelas menengah. Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Jika pekerjaan, produktivitas, pendidikan, dan layanan publik membaik, kelompok tersebut dapat menjadi kelas menengah baru yang memperkuat pasar domestik. Jika biaya hidup dan ketidakpastian meningkat, mereka dapat stagnan atau turun.

Karena itu, strategi kelas menengah tidak boleh dipersempit menjadi stimulus konsumsi. Fokus harus pada productive security: kemampuan menghasilkan pendapatan, mengelola risiko, membangun aset, dan memperoleh layanan dasar berkualitas.

Pemulihan yang sukses pada akhirnya bukan hanya ketika ekonomi kembali tumbuh, tetapi ketika semakin banyak keluarga dapat merencanakan masa depan dengan percaya diri. Mereka mampu membiayai pendidikan anak, memiliki tempat tinggal layak, menjaga kesehatan, menabung, menghadapi shock, dan melihat jalur mobilitas. Itulah kelas menengah yang kuat dan fondasi Indonesia yang lebih tangguh.

23. Kerangka Strategis: Naik Kelas, Bertahan, dan Maju

Kerangka penguatan kelas menengah dapat diringkas dalam tiga tujuan: naik kelas, bertahan, dan maju. Naik kelas berarti membantu kelompok rentan dan menuju kelas menengah memperoleh pekerjaan, keterampilan, dan aset. Bertahan berarti menyediakan perlindungan agar shock tidak menghapus kemajuan. Maju berarti membuka jalur produktivitas dan kekayaan yang memungkinkan kelas menengah memasuki tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Tujuan naik kelas menekankan kesempatan. Pendidikan berkualitas, first job, pembiayaan usaha, akses perumahan, dan transportasi menentukan apakah keluarga memiliki tangga mobilitas. Kebijakan harus mengurangi pengaruh kondisi lahir terhadap hasil kehidupan.

Tujuan bertahan menekankan resiliensi. Jaminan kesehatan, pengangguran, pensiun, asuransi, tabungan, dan perlindungan konsumen menjaga neraca rumah tangga. Sistem ini tidak menghilangkan risiko, tetapi mencegah risiko berubah menjadi kemiskinan.

Tujuan maju menekankan produktivitas. Kelas menengah yang stagnan dalam pekerjaan berproduktivitas rendah tidak akan menjadi basis negara berpendapatan tinggi. Teknologi, inovasi, pendidikan lanjutan, dan pasar kompetitif menjadi fondasi.

Ketiga tujuan tersebut saling berhubungan. Mobilitas tanpa perlindungan menghasilkan kelas menengah rapuh; perlindungan tanpa produktivitas menghasilkan stagnasi; produktivitas tanpa akses memperbesar ketimpangan. Kebijakan perlu menyeimbangkan ketiganya.

24. Dashboard Penguatan Kelas Menengah

Pendapatan riil median: Mengukur kemampuan beli rumah tangga tipikal, bukan hanya rata-rata.

Real wage progression: Menilai apakah karier menghasilkan peningkatan kesejahteraan.

Housing cost burden: Proporsi pendapatan untuk sewa/cicilan dan utilitas.

Education cost burden: Beban pendidikan terhadap pendapatan keluarga.

Health financial risk: Risiko pengeluaran kesehatan yang menguras tabungan.

Debt service ratio: Proporsi pendapatan untuk cicilan.

Emergency savings: Kemampuan membiayai beberapa bulan kebutuhan tanpa pendapatan.

Formal job share: Akses terhadap kontrak, perlindungan, dan jaminan sosial.

Job transition quality: Apakah perpindahan kerja menaikkan atau menurunkan upah.

Home ownership / secure tenure: Keamanan hunian dan akumulasi aset.

Pension and insurance coverage: Ketahanan terhadap risiko jangka panjang.

Intergenerational mobility: Hubungan antara latar keluarga dan capaian anak.

25. Kelas Menengah sebagai Penghubung antara Pertumbuhan dan Demokratisasi Kesejahteraan

Kelas menengah penting bukan hanya karena ukuran konsumsinya, tetapi karena posisinya sebagai jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesejahteraan. Ketika rumah tangga berhasil bergerak dari kelompok rentan menuju kelas menengah, mereka biasanya mulai mengalokasikan sumber daya bukan hanya untuk kebutuhan harian, tetapi juga untuk pendidikan, kesehatan preventif, perumahan, tabungan, rekreasi, dan investasi produktif. Pergeseran pola pengeluaran ini menghasilkan permintaan terhadap produk dan layanan yang lebih beragam dan mendorong struktur ekonomi menjadi lebih kompleks.

Dalam literatur pembangunan, kelas menengah sering dikaitkan dengan stabilitas institusional karena mereka memiliki kepentingan pada kepastian hukum, kualitas layanan, keselamatan, dan stabilitas makro. Namun hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Kelas menengah dapat mendukung status quo ketika merasa terancam atau kehilangan mobilitas. Oleh karena itu, yang paling penting bukan sekadar membesarkan jumlah kelas menengah, tetapi membangun kelas menengah yang merasa memiliki peluang, keamanan ekonomi, dan kepercayaan terhadap institusi.

Indonesia menghadapi tantangan khas berupa besarnya kelompok menuju kelas menengah. Mereka memiliki aspirasi kelas menengah tetapi belum seluruhnya memiliki perlindungan kelas menengah. Mereka menggunakan kendaraan, internet, layanan pendidikan, dan produk keuangan, tetapi banyak yang masih bergantung pada pekerjaan informal atau pendapatan yang berfluktuasi. Mereka dapat tampak relatif sejahtera dalam konsumsi, namun tetap memiliki tabungan tipis dan ketahanan rendah terhadap shock.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, kelompok ini perlu diperlakukan sebagai prioritas strategis. Stimulus yang hanya diarahkan kepada kelompok miskin mungkin tidak cukup menjaga permintaan domestik jika kelompok menuju kelas menengah menahan belanja. Sebaliknya, subsidi universal untuk

seluruh kelas menengah dapat mahal dan tidak tepat sasaran. Kebijakan perlu memusatkan perhatian pada biaya struktural yang menekan mereka: perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan ketidakpastian kerja.

Dari perspektif manajemen publik, kelas menengah sebaiknya dipantau sebagai indikator transisi. Pemerintah perlu mengetahui berapa banyak rumah tangga yang bergerak naik, berapa yang stagnan, dan berapa yang turun. Data cross-sectional memberikan potret satu waktu, tetapi panel data atau pendekatan longitudinal lebih kuat untuk memahami mobilitas. Tanpa informasi tersebut, kebijakan dapat gagal membedakan antara kelas menengah yang mapan dan mereka yang hanya sementara berada di atas ambang.

Kelas menengah yang kuat pada akhirnya merupakan hasil dari sistem yang menghubungkan pendidikan, pekerjaan, produktivitas, kepemilikan aset, dan perlindungan risiko. Ia bukan produk dari satu program. Ini berarti koordinasi antar kebijakan jauh lebih penting daripada jumlah kebijakan yang berdiri sendiri.

26. Tantangan Mobilitas Antargenerasi

Penguatan kelas menengah tidak hanya menyangkut rumah tangga hari ini, tetapi juga peluang anak-anak mereka. Mobilitas antargenerasi mengukur sejauh mana kondisi ekonomi orang tua menentukan posisi ekonomi anak. Masyarakat dengan mobilitas tinggi memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga sederhana untuk mencapai pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang lebih baik.

Pendidikan menjadi mekanisme utama, tetapi kualitas pendidikan tidak seragam. Anak dari keluarga kelas menengah bawah dapat bersekolah, namun kualitas pengajaran, akses kursus, bahasa asing, internet, dan jaringan sosial berbeda dibanding anak dari keluarga lebih kaya. Ketimpangan kesempatan ini dapat membuat mobilitas melambat meskipun angka partisipasi sekolah tinggi.

Kesehatan dan gizi pada awal kehidupan juga memengaruhi kemampuan belajar. Karena itu, penguatan kelas menengah dimulai bahkan sebelum seseorang memasuki pasar kerja. Program gizi, kesehatan ibu-anak, pendidikan usia dini, dan sekolah dasar berkualitas memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas.

Jaringan sosial atau social capital juga berperan. Pekerjaan profesional sering diperoleh bukan hanya melalui ijazah, tetapi informasi, internship, rekomendasi, dan pengalaman. Perguruan tinggi dan program pelatihan perlu menyediakan career services yang mengurangi ketergantungan mahasiswa pada jaringan keluarga.

Biaya pendidikan tinggi dapat menjadi sumber tekanan. Jika keluarga harus berutang besar untuk membiayai kuliah, return pendidikan menjadi kurang pasti. Skema beasiswa, pembiayaan yang adil, dan pendidikan vokasi berkualitas memberi alternatif jalur mobilitas.

Pada akhirnya, kelas menengah yang kuat adalah kelas yang dapat mereproduksi kapabilitas tanpa mereproduksi privilege secara tertutup. Sistem yang sehat memberi ruang bagi pendatang baru untuk naik berdasarkan kemampuan dan kerja, bukan asal keluarga.

27. Kelas Menengah, Tabungan, dan Pembentukan Aset

Pendapatan menentukan konsumsi saat ini, sedangkan aset menentukan keamanan masa depan. Salah satu ciri kelas menengah yang mapan adalah kemampuan mengubah sebagian pendapatan menjadi aset: tabungan, rumah, dana pensiun, pendidikan, bisnis, atau investasi keuangan. Pembentukan aset memberikan buffer ketika pendapatan terganggu.

Namun kemampuan menabung sangat sensitif terhadap biaya hidup. Ketika perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi menyerap sebagian besar pendapatan, rumah tangga memiliki sedikit ruang untuk akumulasi. Inilah alasan mengapa kebijakan layanan publik secara tidak langsung merupakan kebijakan pembentukan kekayaan kelas menengah.

Rumah menjadi aset paling penting bagi banyak keluarga Indonesia. Kepemilikan memberi keamanan hunian dan potensi akumulasi nilai. Tetapi rumah yang terlalu mahal dapat memaksa rumah tangga berutang dalam jangka panjang dan mengurangi diversifikasi aset. Kebijakan perlu memperluas suplai hunian yang terjangkau, bukan hanya mendorong kredit.

Dana pensiun menjadi semakin penting karena perubahan demografi. Kelas menengah yang hanya mengandalkan anak pada masa tua menghadapi risiko tinggi. Sistem pensiun yang luas dan portabel dapat membantu membangun aset jangka panjang sekaligus menyediakan sumber pembiayaan domestik.

Investasi ritel digital membuka akses kepada produk keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko penipuan dan spekulasi. Literasi finansial harus mengajarkan hubungan antara return dan risk, diversifikasi, horizon investasi, dan pentingnya dana darurat.

Kebijakan yang berhasil membantu rumah tangga bergerak dari consumption security menuju asset security. Tahap pertama memastikan kebutuhan harian; tahap kedua membangun buffer; tahap ketiga memperluas aset produktif. Transisi inilah yang membuat kelas menengah lebih tahan terhadap krisis.

28. Industri, Hilirisasi, dan Penciptaan Pekerjaan Kelas Menengah

Hilirisasi dan industrialisasi memiliki potensi besar menciptakan pekerjaan kelas menengah, terutama bila rantai nilai domestik berkembang. Pekerjaan teknisi, supervisor, engineer, logistik, akuntansi, quality control, procurement, dan layanan profesional dapat menghasilkan upah lebih tinggi dibanding pekerjaan berproduktivitas rendah.

Namun proyek padat modal tidak otomatis menghasilkan basis kelas menengah luas. Kunci terletak pada linkage. Perusahaan besar perlu terhubung dengan supplier lokal, sekolah vokasi, universitas, penyedia jasa, dan UMKM. Tanpa linkage, nilai tambah dapat terkonsentrasi.

Supplier development merupakan strategi penting. Perusahaan besar dapat membantu pemasok memenuhi standar kualitas, ketepatan waktu, keselamatan, dan digital traceability. Ketika pemasok lokal naik kelas, mereka menciptakan pekerjaan dan pemilik usaha baru di lapisan menengah.

Kawasan industri juga perlu dirancang sebagai kota kerja yang layak. Perumahan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan ruang publik menentukan apakah pekerja benar-benar menikmati kenaikan standar hidup. Kawasan dengan upah lebih tinggi tetapi biaya hidup melonjak dapat menghasilkan middle-class squeeze lokal.

Pendapatan daerah dari aktivitas industri perlu digunakan untuk meningkatkan human capital dan diversifikasi. Ini mengurangi risiko ketika komoditas atau teknologi berubah. Daerah yang hanya bergantung pada satu sektor akan memiliki kelas menengah yang lebih rentan.

Dengan demikian, kebijakan industri dan kebijakan kelas menengah sebenarnya merupakan dua sisi dari agenda yang sama: membangun ekosistem produktivitas yang menghasilkan pekerjaan, usaha, dan aset.

29. Sektor Jasa Modern dan Masa Depan Kelas Menengah

Kelas menengah tidak hanya dibentuk oleh manufaktur. Sektor jasa modern seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, teknologi informasi, logistik, consulting, desain, pariwisata, dan creative economy dapat menyerap tenaga kerja berpendidikan dan menciptakan pekerjaan dengan jenjang karier.

Jasa memiliki variasi produktivitas sangat besar. Pekerjaan jasa informal berproduktivitas rendah berbeda dengan layanan profesional yang dapat diekspor atau memanfaatkan teknologi. Kebijakan perlu mendorong pergeseran ke tradable dan scalable services.

Digitalisasi membuat jasa lebih mudah diperdagangkan lintas daerah dan negara. Programmer, designer, accountant, atau consultant dapat melayani klien internasional. Ini membuka peluang kelas menengah baru di luar pusat industri jika konektivitas dan keterampilan tersedia.

Namun sektor jasa juga menghadapi risiko platformization. Pekerja bisa menjadi kontraktor tanpa jaminan sosial. Perlu model perlindungan yang mengikuti pekerja, bukan hanya hubungan kerja tradisional.

Care economy memiliki potensi besar. Penuaan penduduk dan partisipasi perempuan meningkatkan kebutuhan childcare, eldercare, dan layanan kesehatan. Jika profesionalisasi dan standar meningkat, sektor ini dapat menciptakan pekerjaan kelas menengah.

Strategi jasa modern harus mencakup kualitas pendidikan, bahasa, digital skills, sertifikasi, dan regulasi yang memungkinkan inovasi tanpa mengorbankan perlindungan pekerja.

30. Mengelola Risiko Krisis terhadap Kelas Menengah

Krisis ekonomi sering memperlihatkan bahwa kelas menengah tidak kebal terhadap guncangan. Penurunan permintaan dapat menyebabkan PHK, pasar aset dapat jatuh, usaha kecil kehilangan omzet, dan nilai tabungan tergerus inflasi. Karena kelas menengah memiliki pengeluaran tetap yang besar, penurunan pendapatan dapat terasa sangat cepat.

Kebijakan stabilisasi makro merupakan garis pertahanan pertama. Inflasi terkendali, sistem keuangan stabil, cadangan fiskal, dan respons moneter yang kredibel mengurangi kemungkinan shock berkembang menjadi krisis rumah tangga.

Garis pertahanan kedua adalah automatic stabilizers. Ketika pendapatan turun, pajak seharusnya ikut turun sementara bantuan atau asuransi meningkat. Sistem seperti ini mengurangi perlunya program darurat baru setiap krisis.

Garis ketiga adalah neraca rumah tangga. Tabungan darurat dan utang yang sehat menentukan kapasitas bertahan. Edukasi keuangan dan regulasi kredit harus dianggap bagian dari kebijakan makroprudensial sosial.

Garis keempat adalah mobilitas pasar kerja. Ekonomi yang fleksibel memungkinkan pekerja yang kehilangan pekerjaan berpindah ke sektor lain dengan cepat. Job matching, training, dan pengakuan keterampilan mempercepat transisi.

Garis kelima adalah layanan publik. Ketika sekolah dan kesehatan tetap dapat diakses meski pendapatan turun, keluarga tidak harus mengorbankan investasi pada anak. Ini mencegah shock jangka pendek menjadi kerugian antargenerasi.

Resiliensi kelas menengah pada akhirnya mengurangi kedalaman resesi. Rumah tangga yang memiliki buffer tidak perlu memangkas konsumsi secara ekstrem. Dengan demikian, perlindungan kelas menengah juga merupakan stabilizer bagi ekonomi nasional.

31. Desain Kebijakan: Menghindari Dua Ekstrem

Kebijakan kelas menengah menghadapi dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah mengabaikan kelas menengah dengan alasan mereka sudah tidak miskin. Pendekatan ini gagal melihat kerentanan dan kontribusi mereka terhadap konsumsi serta penerimaan negara. Ekstrem kedua adalah memberikan subsidi luas kepada kelas menengah tanpa membedakan kebutuhan, yang dapat mahal dan regresif.

Pendekatan yang lebih baik adalah universal basic services dan targeted risk protection. Layanan dasar berkualitas dapat dinikmati luas, sementara bantuan tunai atau subsidi spesifik diarahkan kepada mereka yang mengalami shock atau memiliki beban tertentu.

Perumahan menyediakan contoh. Pemerintah tidak perlu mensubsidi rumah mahal bagi semua orang. Kebijakan dapat fokus pada suplai lahan, transportasi, regulasi, rumah sewa, dan pembiayaan kelompok first-home buyer yang layak.

Pendidikan juga demikian. Sekolah publik berkualitas memberi manfaat universal, sedangkan beasiswa dapat ditargetkan berdasarkan kebutuhan dan prestasi. Kombinasi ini menjaga fairness.

Kebijakan pajak harus mempertimbangkan life-cycle. Rumah tangga muda dengan anak mungkin memiliki pengeluaran wajib tinggi meskipun pendapatan bruto cukup. Sistem yang sensitif terhadap tanggungan dapat lebih adil.

Intinya, kelas menengah membutuhkan institusi yang menurunkan biaya hidup, menjaga risiko, dan membuka peluang, bukan sekadar transfer tunai permanen.

32. Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam pembentukan kelas menengah karena menghubungkan pendidikan dengan pekerjaan. Namun fungsi tersebut tidak cukup dilakukan melalui pemberian gelar. Kampus harus memahami perubahan pekerjaan, teknologi, dan kebutuhan industri.

Career center, internship, apprenticeship, microcredential, executive education, dan lifelong learning perlu diperkuat. Alumni yang kehilangan pekerjaan akibat restrukturisasi seharusnya dapat kembali ke kampus untuk reskilling.

Dunia usaha juga perlu melihat pengembangan pekerja sebagai investasi. Internal mobility, mentoring, dan training mengurangi turnover dan membangun tenaga kerja produktif. Perusahaan yang hanya merekrut keterampilan dari luar tanpa mengembangkan pekerja berkontribusi pada skills shortage.

Kolaborasi universitas-industri dapat membantu UMKM melalui konsultasi, digitalisasi, desain produk, dan riset pasar. Ini memperluas kelas menengah pengusaha.

Business school khususnya dapat berperan dalam meningkatkan management productivity. Banyak perbedaan produktivitas antarperusahaan berasal dari praktik manajemen, bukan teknologi semata. Pelatihan manajemen untuk SME owners dapat menghasilkan dampak nyata.

Dengan demikian, penguatan kelas menengah memerlukan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang melibatkan sekolah, kampus, perusahaan, asosiasi profesi, dan platform digital.

33. Peta Jalan 2026-2035: Menuju Kelas Menengah yang Lebih Besar dan Tangguh

Peta jalan pertama adalah membangun foundation of mobility pada 2026-2028: memperkuat penciptaan kerja, pengendalian inflasi, first-job transition, social insurance, dan layanan dasar. Fokus tahap ini adalah mencegah downward mobility dan menjaga pemulihan.

Tahap kedua, 2028-2031, adalah productivity upgrading. Program digitalisasi perusahaan, vocational reform, supplier development, green jobs, dan modern services perlu dipercepat. Targetnya bukan hanya lebih banyak pekerjaan, tetapi lebih banyak pekerjaan dengan upah kelas menengah.

Tahap ketiga, 2031-2035, adalah asset deepening. Kebijakan pensiun, perumahan, capital market inclusion, kewirausahaan, dan intergenerational mobility perlu diperkuat agar kelas menengah memiliki kekayaan dan resiliensi.

Setiap tahap memerlukan dashboard. Pemerintah harus memantau proporsi penduduk yang naik dari menuju kelas menengah ke kelas menengah, serta mereka yang turun. Mobilitas harus menjadi KPI nasional.

Peta jalan juga perlu bersifat regional. Target Jakarta berbeda dari Papua, Sulawesi, atau kota sekunder. Cost of living, struktur pekerjaan, dan kualitas layanan berbeda.

Yang terpenting, kebijakan harus konsisten lintas pemerintahan. Rumah tangga membuat keputusan pendidikan, rumah, dan karier untuk jangka panjang. Ketidakpastian kebijakan dapat mengurangi investasi mereka sendiri.

Indonesia dapat memasuki fase pembangunan yang lebih matang bila kelas menengah bertumbuh bukan karena konsumsi sementara, tetapi karena produktivitas, aset, dan kesempatan. Itulah basis sosial bagi negara berpendapatan tinggi.

34. Mengukur Apakah Kelas Menengah Benar-Benar Menguat

Penguatan kelas menengah tidak dapat dinilai hanya dari jumlah orang yang masuk dalam satu rentang pengeluaran pada satu titik waktu. Kelas menengah yang benar-benar kuat harus memiliki empat karakteristik: pendapatan yang cukup dan berkembang, aset yang membentuk buffer, akses terhadap layanan dasar berkualitas, serta kemampuan menghadapi shock tanpa jatuh secara tajam. Dengan demikian, indikator kelas menengah perlu menggabungkan flow dan stock: arus pendapatan serta stok kekayaan.

Ukuran pertama adalah pendapatan riil median dan pertumbuhannya. Rata-rata pendapatan dapat meningkat karena kelompok atas menikmati kenaikan besar, sedangkan rumah tangga tipikal stagnan. Median memberi gambaran lebih dekat kepada pengalaman mayoritas. Selain itu, pertumbuhan pendapatan perlu dianalisis menurut umur, pendidikan, gender, wilayah, dan sektor pekerjaan.

Ukuran kedua adalah disposable income setelah biaya wajib. Dua keluarga dengan pendapatan sama belum tentu memiliki kemampuan ekonomi sama. Keluarga yang membayar sewa tinggi, daycare, transportasi, dan biaya kesehatan mungkin memiliki ruang tabungan jauh lebih kecil. Karena itu, housing burden, transport burden, education burden, dan health expenditure perlu masuk dashboard.

Ukuran ketiga adalah financial resilience. Pertanyaan praktisnya: berapa bulan rumah tangga dapat membiayai kebutuhan jika pendapatan berhenti? Apakah mereka mempunyai asuransi? Seberapa besar debt service ratio? Berapa proporsi utang konsumtif dibanding utang pembentuk aset? Ukuran ini dapat mendeteksi kelas menengah yang tampak sejahtera tetapi rapuh.

Ukuran keempat adalah occupational mobility. Kelas menengah menguat jika pekerja dapat memperoleh promosi, berpindah ke perusahaan lebih produktif, atau memasuki profesi baru dengan pendapatan lebih tinggi. Stagnasi karier selama bertahun-tahun akan menimbulkan middle-class squeeze meskipun pekerjaan formal tetap ada.

Ukuran kelima adalah intergenerational opportunity. Keluarga akan merasa kelas menengahnya bermakna ketika anak memiliki peluang lebih baik, bukan lebih buruk. Akses sekolah berkualitas, universitas, pekerjaan pertama, dan perumahan menjadi indikator aspirasi. Bila generasi muda berpendidikan lebih tinggi tetapi kesulitan memperoleh rumah dan pekerjaan stabil, kontrak sosial kelas menengah melemah.

Ukuran keenam adalah subjective security. Survei keyakinan konsumen dan persepsi keadaan ekonomi memberi informasi tentang rasa aman yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh pendapatan. Persepsi tidak menggantikan statistik objektif, tetapi dapat menjadi early warning terhadap kekhawatiran pekerjaan, inflasi, atau biaya hidup.

Pemerintah dapat menggabungkan indikator tersebut dalam Middle-Class Resilience Index. Indeks semacam ini tidak perlu menggantikan statistik BPS yang ada, tetapi dapat menjadi dashboard manajerial yang menghubungkan pasar kerja, harga, perumahan, keuangan, dan layanan publik. Tujuannya adalah mengenali tekanan sebelum rumah tangga benar-benar turun kelas.

Pengukuran yang lebih baik juga mencegah kebijakan salah sasaran. Jika masalah utama kelompok muda adalah perumahan, transfer tunai sementara tidak menyelesaikan akar masalah. Jika masalah pekerja profesional adalah displacement teknologi, subsidi harga tidak cukup. Data yang mengidentifikasi sumber tekanan memungkinkan kebijakan lebih hemat dan efektif.

35. Sebuah Strategi Nasional untuk Middle-Class Security

Indonesia memerlukan pendekatan yang dapat disebut middle-class security: suatu strategi untuk memastikan bahwa rumah tangga yang telah keluar dari kemiskinan dapat membangun kehidupan stabil, sementara mereka yang mendekati kelas menengah memiliki jalur yang realistis untuk naik. Security di sini bukan berarti mempertahankan status melalui proteksi permanen, tetapi membangun kemampuan untuk beradaptasi.

Pilar pertama adalah income security melalui pekerjaan produktif. Pertumbuhan perlu menciptakan occupational ladder yang jelas dari entry-level menuju skilled, supervisory, managerial, professional, dan entrepreneurial roles. Industri dan jasa modern harus menjadi mesin mobilitas, bukan enclave ekonomi.

Pilar kedua adalah cost security. Pemerintah perlu fokus pada komponen yang paling menggerus pendapatan kelas menengah: perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, energi, dan childcare. Efisiensi pada bidang ini memiliki efek seperti kenaikan gaji riil karena mengurangi pengeluaran wajib.

Pilar ketiga adalah risk security. Jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan pengangguran, asuransi bencana, dan regulasi kredit mengurangi kemungkinan shock menjadi downward mobility. Sistem perlu portabel karena karier modern semakin sering berpindah antara perusahaan, kontrak, usaha mandiri, dan platform.

Pilar keempat adalah asset security. Kebijakan perlu membantu rumah tangga membangun tabungan dan aset secara bertahap. Insentif tabungan pensiun, rumah terjangkau, investasi ritel yang aman, dan dukungan kewirausahaan dapat memperkuat neraca keluarga.

Pilar kelima adalah capability security. Dunia berubah cepat; aset keterampilan perlu terus diperbarui. Lifelong learning harus menjadi infrastruktur sosial sebagaimana jalan dan listrik. Pekerja usia empat puluh atau lima puluh tahun perlu memiliki akses reskilling yang relevan, bukan hanya mahasiswa muda.

Pilar keenam adalah institutional security. Rumah tangga kelas menengah mengambil keputusan jangka panjang berdasarkan kepercayaan bahwa aturan tidak berubah secara mendadak, hak milik aman, sistem pajak dapat dipahami, dan layanan publik dapat diandalkan. Kepastian kebijakan menurunkan precautionary behavior dan mendorong investasi.

Pilar ketujuh adalah opportunity security bagi generasi berikut. Pendidikan, kesehatan anak, ruang kota, digital access, dan meritocratic labor markets memastikan bahwa mobilitas tidak tertutup. Kelas menengah yang merasa anak-anaknya akan hidup lebih buruk dapat menjadi sumber frustrasi sosial.

Strategi ini perlu diletakkan di atas kerangka fiskal yang berkelanjutan. Tidak semua risiko dapat dijamin pemerintah dan tidak semua layanan harus gratis. Negara harus memilih intervensi dengan social return tinggi, menargetkan subsidi dengan baik, dan memastikan kualitas. Dunia usaha dan rumah tangga tetap memiliki tanggung jawab dalam investasi, tabungan, dan peningkatan keterampilan.

Dengan middle-class security, pemulihan ekonomi berubah dari agenda jangka pendek menjadi proses pembangunan institusi. Pertanyaan kebijakan tidak lagi hanya 'bagaimana menjaga konsumsi tahun ini', tetapi 'bagaimana membuat keluarga Indonesia lebih mampu menghadapi perubahan sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan'. Pendekatan ini relevan ketika negara bergerak menuju pendapatan tinggi dan struktur ekonomi menjadi lebih kompleks.

Pada akhirnya, kelas menengah yang tangguh bukan kelas yang bebas dari risiko, melainkan kelas yang memiliki sumber daya, institusi, dan kapabilitas untuk merespons risiko tanpa kehilangan seluruh kemajuan. Inilah jenis kelas menengah yang dapat menjadi bantalan ekonomi nasional sekaligus motor transformasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan stabil.

36. Refleksi Akhir: Dari Bantalan Ekonomi menuju Motor Transformasi Nasional

Istilah 'bantalan ekonomi' menggambarkan fungsi kelas menengah dalam menjaga stabilitas konsumsi ketika ekonomi menghadapi guncangan. Namun bagi Indonesia yang sedang berupaya naik menuju status negara berpendapatan tinggi, fungsi kelas menengah perlu dipahami lebih ambisius. Kelas menengah bukan hanya bantalan, melainkan juga motor transformasi. Mereka menjadi tenaga profesional, pengusaha, manajer, guru, tenaga kesehatan, teknisi, kreator, peneliti, konsumen teknologi, dan pembayar pajak yang menopang kompleksitas ekonomi modern.

Karena itu, kebijakan pemulihan perlu menghindari jebakan melihat kelas menengah hanya dari sisi konsumsi. Konsumsi memang penting bagi permintaan agregat, tetapi kontribusi terbesar kelas menengah dalam jangka panjang terletak pada human capital, entrepreneurship, innovation, civic participation, dan pembentukan aset. Kebijakan yang terlalu fokus pada insentif belanja dapat mengabaikan investasi produktif yang menentukan ketahanan mereka.

Indonesia juga perlu memikirkan ukuran keberhasilan yang lebih dinamis. Target tidak cukup berupa berapa persen penduduk berada di kelas menengah pada satu tahun. Yang lebih bermakna adalah berapa banyak rumah tangga dari kelompok menuju kelas menengah yang naik dalam lima tahun, berapa lama mereka bertahan, dan apakah generasi berikut memperoleh kesempatan yang lebih besar. Mobilitas adalah jantung konsep kelas menengah.

Pemulihan ekonomi pascapandemi dan berbagai shock global memberikan pelajaran bahwa status ekonomi dapat berubah cepat. Rumah tangga yang sebelumnya mapan dapat mengalami kehilangan pekerjaan, bisnis dapat kehilangan pasar, dan biaya kesehatan dapat meningkat. Karena itu, resiliensi harus menjadi bagian desain pembangunan, bukan program tambahan ketika krisis datang.

Di sisi lain, terlalu banyak perlindungan tanpa insentif produktivitas dapat menghasilkan stagnasi. Kebijakan harus tetap mendorong kompetisi, inovasi, kerja, dan pengambilan risiko yang sehat. Kelas menengah tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa pendidikan, usaha, dan keterampilan memberi return. Sistem yang terlalu bergantung pada subsidi akan melemahkan sinyal produktif.

Tantangan kebijakan adalah menemukan keseimbangan antara protection dan progression. Protection menjaga agar shock tidak menghancurkan rumah tangga; progression memastikan bahwa mereka terus memiliki alasan dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas. Keduanya diperlukan. Protection tanpa progression menciptakan ketergantungan; progression tanpa protection menghasilkan kecemasan dan ketimpangan risiko.

Keseimbangan serupa berlaku pada teknologi. AI dan otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas nasional, tetapi manfaatnya harus diterjemahkan menjadi pekerjaan baru, upah, harga lebih rendah, atau layanan lebih baik. Jika teknologi hanya meningkatkan keuntungan pemilik modal sementara pekerja tidak memperoleh jalur transisi, middle-class squeeze dapat membesar. Kebijakan teknologi harus selalu memiliki human transition dimension.

Demikian pula dengan ekonomi hijau. Transisi energi diperlukan untuk keberlanjutan, tetapi biaya tidak boleh dibebankan secara tidak proporsional kepada rumah tangga menengah bawah. Efisiensi energi, transportasi publik, rumah hemat energi, dan pekerjaan hijau dapat justru memperkuat kelas menengah apabila dirancang dengan baik. Just transition adalah prinsip distribusi risiko dan kesempatan.

Kelas menengah yang kuat juga membutuhkan ruang publik dan kehidupan sosial yang berkualitas. Kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan dan kepemilikan aset, tetapi oleh keamanan, waktu bersama keluarga, kualitas lingkungan, akses budaya, dan kepercayaan sosial. Kota yang sangat produktif tetapi penuh kemacetan, polusi, dan biaya hunian ekstrem dapat menghasilkan pendapatan tinggi namun kualitas hidup rendah.

Dalam konteks ini, peran negara bukan untuk menjamin setiap hasil, melainkan membangun platform kesempatan: pendidikan yang baik, kesehatan, infrastruktur, hukum, persaingan, perlindungan risiko, dan informasi. Di atas platform tersebut, rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan, bekerja, berinovasi, dan membangun aset. Negara yang efektif memperkecil risiko yang tidak dapat dikelola individu, tetapi tetap memberi ruang pada tanggung jawab dan inisiatif.

Pemulihan ekonomi Indonesia pada pertengahan dekade 2020-an memberi momentum untuk membangun platform tersebut. Pertumbuhan yang tetap sekitar lima persen menunjukkan fondasi yang relatif kuat, sementara konsumsi domestik memberi stabilitas. Namun momentum hanya akan menghasilkan lompatan apabila peningkatan produktivitas disertai perluasan pekerjaan kelas menengah dan layanan publik yang semakin baik.

Dengan demikian, agenda memperkuat kelas menengah seharusnya menjadi salah satu kerangka utama pembangunan nasional. Ia menghubungkan pengentasan kemiskinan dengan produktivitas, fiskal dengan layanan, pendidikan dengan kerja, perumahan dengan kota, teknologi dengan mobilitas, dan pertumbuhan dengan kualitas hidup. Kelas menengah yang besar, tangguh, produktif, dan optimistik merupakan fondasi sosial-ekonomi yang memungkinkan Indonesia bergerak dari sekadar pemulihan menuju kemajuan yang berkelanjutan.

Satu aspek tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas data tentang kelas menengah. Banyak indikator sosial-ekonomi masih bersifat periodik dan tidak selalu mampu menangkap perubahan cepat akibat PHK, perpindahan kerja, kenaikan biaya sewa, atau penggunaan kredit digital. Integrasi data survei dengan data administratif, tetap dengan perlindungan privasi, dapat membantu pemerintah memahami perubahan posisi rumah tangga secara lebih cepat. Informasi semacam ini penting agar bantuan, pelatihan, dan layanan kerja dapat diberikan sebelum rumah tangga benar-benar jatuh ke kondisi yang jauh lebih buruk.

Penguatan kelas menengah juga perlu dikaitkan dengan agenda reformasi birokrasi. Biaya administrasi, perizinan, ketidakpastian aturan, dan layanan publik yang lambat merupakan pajak implisit bagi rumah tangga dan usaha. Ketika proses menjadi lebih sederhana dan transparan, waktu serta biaya dapat dialihkan kepada kegiatan produktif. Digital government yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan convenience sekaligus mengurangi biaya transaksi, tetapi harus menyediakan alternatif bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses digital.

Akhirnya, keberhasilan kebijakan kelas menengah memerlukan narasi pembangunan yang jelas. Masyarakat perlu memahami bahwa tujuan reformasi bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan membangun kemampuan warga untuk memperoleh pekerjaan yang baik, memiliki rumah yang layak, membiayai pendidikan, menjaga kesehatan, menabung, dan menghadapi masa tua dengan aman. Narasi tersebut penting karena kebijakan produktivitas sering membutuhkan waktu sebelum hasilnya terasa. Kepercayaan publik dapat dipertahankan apabila jalur antara reformasi dan manfaat rumah tangga dijelaskan secara terbuka dan kemajuannya diukur secara konsisten.

Pada tataran implementasi, pemerintah dapat menetapkan target tahunan yang sederhana tetapi bermakna: peningkatan proporsi pekerjaan dengan upah riil yang tumbuh, penurunan beban biaya perumahan bagi rumah tangga muda, perluasan cakupan pensiun dan asuransi, kenaikan jumlah UMKM yang naik kelas, serta peningkatan mobilitas dari kelompok menuju kelas menengah ke kelas menengah. Target seperti ini lebih dekat dengan pengalaman warga daripada ukuran input birokrasi. Dunia usaha dapat melaporkan investasi dalam pelatihan, wage progression, dan internal mobility; perguruan tinggi dapat melaporkan employment outcomes lulusannya; pemerintah daerah dapat melaporkan keterjangkauan hunian dan waktu perjalanan. Dengan begitu, penguatan kelas menengah menjadi agenda bersama yang terukur.

Pendekatan tersebut juga membantu menghindari fragmentasi. Kebijakan perumahan tidak boleh dipisahkan dari transportasi, kebijakan pendidikan tidak boleh dipisahkan dari pasar kerja, dan kebijakan teknologi tidak boleh dipisahkan dari reskilling. Setiap keputusan besar perlu diuji dengan pertanyaan yang sama: apakah kebijakan ini memperbesar peluang rumah tangga untuk naik kelas, mempertahankan posisi ketika terkena shock, dan membangun aset untuk masa depan? Jika jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut positif, maka kebijakan tersebut bukan hanya mendukung pertumbuhan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial pemulihan ekonomi Indonesia.

Glossarium

Kelas menengah: Kelompok rumah tangga dengan tingkat pengeluaran di atas kelompok menuju kelas menengah dan di bawah kelas atas; definisi BPS menggunakan rentang 3,5-17 kali garis kemiskinan.

Menuju kelas menengah: Kelompok dengan pengeluaran sekitar 1,5-3,5 kali garis kemiskinan menurut klasifikasi BPS.

Rentan miskin: Kelompok di atas miskin tetapi dekat dengan garis kemiskinan, sekitar 1,0-1,5 kali garis kemiskinan.

Mobilitas sosial: Perubahan posisi sosial-ekonomi seseorang atau rumah tangga dari waktu ke waktu.

Downward mobility: Penurunan posisi sosial-ekonomi, misalnya dari kelas menengah ke menuju kelas menengah.

Upward mobility: Peningkatan posisi sosial-ekonomi melalui pendapatan, aset, pendidikan, atau pekerjaan.

Daya beli: Kemampuan pendapatan memperoleh barang dan jasa pada tingkat harga tertentu.

Upah riil: Upah nominal yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat harga.

Produktivitas: Output atau nilai tambah per unit input, termasuk per pekerja.

Pekerjaan berkualitas: Pekerjaan yang menyediakan pendapatan memadai, stabilitas, perlindungan, dan peluang berkembang.

Social wage: Manfaat layanan publik yang menurunkan biaya efektif rumah tangga.

Affordability: Keterjangkauan suatu kebutuhan relatif terhadap pendapatan.

Housing cost burden: Proporsi pendapatan yang digunakan untuk biaya hunian.

Debt service ratio: Proporsi pendapatan yang digunakan untuk pembayaran cicilan utang.

Precautionary saving: Tabungan berjaga-jaga untuk menghadapi ketidakpastian.

Resiliensi rumah tangga: Kemampuan mempertahankan taraf hidup saat terkena shock.

Perlindungan sosial adaptif: Sistem perlindungan yang dapat merespons perubahan kondisi secara cepat.

Portable benefits: Manfaat sosial yang dapat mengikuti pekerja saat berganti pekerjaan atau status kerja.

Reskilling: Pembelajaran keterampilan baru untuk beralih pekerjaan.

Upskilling: Peningkatan keterampilan dalam bidang kerja yang sama.

Care economy: Kegiatan ekonomi terkait pengasuhan anak, lansia, kesehatan, dan perawatan.

Middle-class squeeze: Tekanan ketika pendapatan kelas menengah tumbuh lambat sementara biaya kebutuhan penting meningkat.

Intergenerational mobility: Kemampuan generasi anak mencapai posisi ekonomi berbeda dari orang tuanya.

Productive security: Kombinasi kapasitas menghasilkan pendapatan dan perlindungan terhadap risiko yang memungkinkan rumah tangga bertahan dan berkembang.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2024, 25 Oktober). Kelas menengah Indonesia krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2025, 2 Mei). Memahami perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Mei). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Mei). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026, 1 Juli). Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026, 10 Juni). Survei Konsumen Mei 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat. Bank Indonesia.
- World Bank. (2025). Indonesia Economic Prospects, June 2025: People-first housing - A roadmap from homes to jobs to prosperity in Indonesia. World Bank.
- OECD. (2026). Indonesia: OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1. OECD Publishing.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2008). What is middle class about the middle classes around the world? *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 3-28. <https://doi.org/10.1257/jep.22.2.3>
- Easterly, W. (2001). The middle class consensus and economic development. *Journal of Economic Growth*, 6, 317-335. <https://doi.org/10.1023/A:1012786330095>
- OECD. (2019). Under pressure: The squeezed middle class. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/689afed1-en>
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>

- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623. <https://doi.org/10.1093/qje/qju022>
- Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2013). Who creates jobs? Small versus large versus young. *Review of Economics and Statistics*, 95(2), 347-361. https://doi.org/10.1162/REST_a_00288
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1-33. <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>
- World Bank. (2019). *World Development Report 2019: The changing nature of work*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1328-3>

Catatan Penulis

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD. Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI). Profil penulis: www.rudyc.com/cv.pdf.